

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri dengan adanya otonomi daerah, sehingga berbagai upaya pembangunan daerah akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah guna mencapai tujuan dan kesuksesan. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan perencanaan dan pemilihan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2004). Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintahan serta kemajuan teknologi dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerahnya.

Tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah mempunyai kedudukan strategis yang mana menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi. Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan guna mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan tahapan yang saling berkaitan untuk kegiatan pembangunan yang disusun oleh setiap instansi pemerintah yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) Kabupaten Solok.

Alasan Penulis mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana proses penyusunan RKPD secara terperinci dan sistematis, khususnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Daerah yang dituangkan dalam judul **“Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan (BARENLITBANG) Kabupaten Solok adalah **“Bagaimana Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok?”**.

1.3 Tujuan Magang

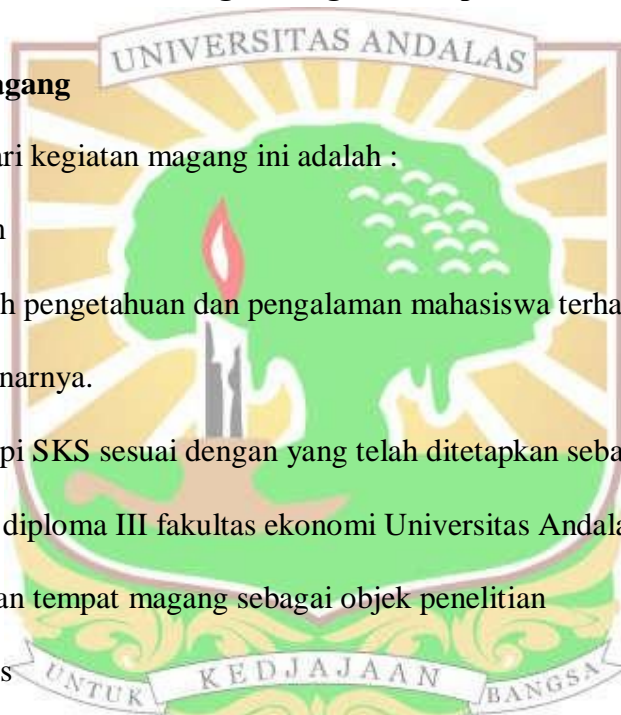
Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

A. Secara Umum

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa terhadap dunia kerja yang sebenarnya.
2. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan diploma III fakultas ekonomi Universitas Andalas.
3. Menjadikan tempat magang sebagai objek penelitian

B. Secara Khusus

1. Mengetahui bagaimana Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.
2. Mengkaji kendala yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Solok dalam realisasi penyusunan RKPD.



1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini adalah :

A. Bagi penulis

1. Memberikan gambaran serta pengalaman tentang bagaimana beradaptasi dengan situasi dunia kerja sesungguhnya, khususnya di lingkungan Pemerintahan Daerah.
2. Memperoleh bahan-bahan atau data yang berkaitan dengan tahapan penyusunan RKPD, yang mana data tersebut akan dijadikan dasar penyusunan laporan kegiatan magang sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) pada jurusan Keuangan Negara dan Daerah Program Studi DIII Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

B. Bagi Perguruan Tinggi

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian profesional sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Menjalin hubungan baik antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

C. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi BAPEDDA Kabupaten Solok dalam menyusun RKPD agar lebih optimal kedepannya.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan (BARENLITBANG) selama 40 hari kerja, pada tanggal 16 Januari s/d 28 Februari 2020.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang dijadikan sarana dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode yang digunakan adalah :

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung dan melakukan wawancara dengan pegawai yang ada di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Perencanaan Daerah, serta melaksanakan magang pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

b. Pencarian Data Melalui Internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait, seperti mengunjungi website agar penulis dapat melengkapi data yang diperlukan guna untuk keperluan tugas akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data.

BAB II:LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari Pengertian Perencanaan, Manfaat Perencanaan, Pengertian Rencana Kerja, Pengertian RKPD, Teori Tahapan RKPD dan Landasan Hukum.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi gambaran umum Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Barenlitbang, Tugas dan Fungsi masing masing bidang di Barenlitbang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang bagaimana Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB V : PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan

